

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ini ialah dengan di bentuknya suatu lembaga pemerintah yaitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang berada di tingkat pusat. BNPB merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas utama dalam penanggulangan bencana pada tingkat nasional. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini termasuk lembaga yang berada di tingkat daerah kota maupun kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri merupakan unsur pendukung tugas dari Bupati Karimun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun. Mitigasi atau mengurangi dampak bencana dilakukan untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda. Oleh karena itu instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan bencana yang memiliki fungsi untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahaya bencana alam tentu sangat dibutuhkan agar perlindungan yang diberikan oleh negara dapat benar-benar optimal (Trisatio, 2019).

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik dari faktor alam atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007). Bencana sendiri terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sementara itu dalam penanganan bencana diperlukan yang namanya *disaster manajemen* (manajemen bencana) adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Oleh karena itu, terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu:

1. Fase Mitigasi: upaya memperkecil dampak negative bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; pembelajaran *public*.
2. Fase *Preparedness*: merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, *system* peringatan.
3. Fase respon: upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contoh: pencarian dan pertolongan; tindakan darurat,
4. Fase *Recovery*: mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contoh: perumahan sementara, bantuan keuangan; perawatan kesehatan.

Keempat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut diatas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Dengan demikian, berkaitan dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada bencana alam banjir setelah pasca bencana yang di mana ingin mengetahui bagaimana strategi BPBD itu sendiri dalam penanggulangan pasca bencana yang mereka lakukan, seperti halnya pada kegiatan pra bencana, tanggap darurat. Maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana program atau rencana BPBD dalam penanggulangan pasca bencana yang ada di Kabupaten Karimun, selain itu dalam pasca bencana terdapat beberapa tahapan, dalam tahapan ini mencakup yaitu :

1. Pemulihan (*Recovery*)

Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan berfungsi kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

2. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

3. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik. (BPBD. Bogorkab.go.id, 2019).

Penanggulangan bencana adalah segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat. Hal tersebut bahwa sebuah komunitas dalam penanggulangan bencana di dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sehingga setiap terjadinya bencana maka sebuah kelompok masyarakat mempunyai kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi keberlangsungan hidupnya. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari berbagai macam bencana seperti halnya bencana yang sering terjadi ialah bencana banjir, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin

terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara (Arsyad, 2017).

Wilayah di 5 kelurahan yang ada di kabupaten karimun yang kerap di landa banjir dikala masa hujan yaitu kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat. Pada saat pasca bencana banjir di lokasi daerah yang terdampak banjir mengalami kerugian dari segi material dan non material seperti kerusakan bangunan – bangunan, kesulitan air bersih, kelihatan harta benda, timbulnya penyakit, melumpuhkan aktivitas masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karimun akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka untuk memulihkan kondisi daerah terdampak banjir agar kembali seperti semula dengan program – program yang berkaitan dengan tahapan pasca bencana. Dalam pemulihan kondisi terdampak banjir banyak kendala yang ada seperti terlalu luasnya daerah terdampak banjir, kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan, juga terbatasnya dana yang ada. Maka dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkan strategi dari BPBD untuk menanggulangi pasca bencana banjir agar dapat terlaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karimun mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Karimun bertanggung jawab dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang mencakup rencana kesiapsiagaan, penanggulangan, dan pemulihan pasca-bencana.
2. Pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, BPBD Kabupaten Karimun melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang tindakan pencegahan bencana serta pengembangan sistem peringatan dini.
3. Koordinasi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Karimun bertugas untuk memimpin koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam hal evakuasi dan penyelamatan korban, serta pemulihan pasca-bencana.
4. Pengumpulan dan analisis informasi bencana, BPBD Kabupaten Karimun mengumpulkan, menganalisis, dan memantau informasi bencana yang terjadi di daerahnya, serta melakukan penilaian risiko bencana secara berkala.
5. Pembentukan dan pelatihan relawan bencana, BPBD Kabupaten Karimun bertanggung jawab dalam pembentukan relawan bencana dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat menghadapi bencana dengan lebih baik.
6. Pengelolaan logistik dan fasilitas kedaruratan, BPBD Kabupaten Karimun mengelola logistik dan fasilitas kedaruratan yang diperlukan dalam

penanganan bencana, seperti barang-barang kebutuhan pokok, tenda darurat, dan alat-alat medis.

7. Pemulihan pasca-bencana, BPBD Kabupaten Karimun bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pemulihan pasca-bencana, termasuk dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana (Profil BPBD Kabupaten Karimun, 2021).

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini terdapat data indeks risiko bencana Indonesia mengenai indeks risiko provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Kepulauan Riau Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2022

No.	KABUPATEN /KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Risiko 2022
1	Bintan	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	Sedang
2	Karimun	120.20	120.20	120.20	120.20	120.20	120.20	120.20	120.20	Sedang
3	Natuna	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	Sedang
4	Kota Tanjung Pinang	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	Sedang
5	Kota Batam	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	117.57	103.96	Sedang
6	Lingga	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	103.15	Sedang
7	Kepulauan Anambas	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	112.40	103.40	95.77	Sedang

Sumber : Dokumen indeks risiko bencana Indonesia

Menurut indeks risiko Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Karimun memiliki nilai indeks risiko dari tahun 2015 sampai tahun 2022 menyentuh angka 120,40 di mana Kabupaten Karimun termasuk kelas risiko sedang.

Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Kabupaten Karimun memiliki 14 kecamatan dan 29 kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai

kurang lebih 270.121 jiwa dengan kepadatan penduduk 180 jiwa/km² . Kabupaten Karimun memiliki lokasi yang cukup strategis serta berdekatan dengan negara Singapura dan negara Malaysia . Hal ini sering mengakibatkan Kabupaten Karimun jika memasuki bulan-bulan yang memiliki curah hujan yang tinggi maka wilayah sebagian Karimun akan mengalami terjadi banjir terutama di 5 kelurahan yaitu; Lubuk Semut, Teluk air, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat. Kelurahan Lubuk Semut yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.634 jiwa dan di bagi ke dalam 12 RT dan 3 RW. Kelurahan Teluk Air memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.385 jiwa dan di bagi ke dalam 13 RT dan 2 RW. Kelurahan Tanjung Balai memiliki jumlah penduduk kurang lebih 6.235 jiwa. Sungai Lakam Timur memiliki jumlah penduduk kurang lebih 9.345 jiwa. Dan Sungai Lakam Barat memiliki jumlah penduduk kurang lebih 10.909 jiwa yang di bagi menjadi 18 RT dan 3 RW (Profil Kabupaten Karimun, 2022).

Sehingga 5 kelurahan tersebut setiap tahunnya merupakan kelurahan yang sering terjadi bencana banjir. Kelurahan tersebut sering terkena banjir yang berasal dari curah hujan yang cukup tinggi dan terkadang juga ada yang disebabkan oleh air laut pasang serta mengakibatkan hampir seluruh rumah warga di daerah tersebut tergenang oleh banjir. Selain curah hujan yang tinggi penyebab terjadinya banjir di daerah ini ialah kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan masih banyak masyarakat di setiap kelurahan tersebut yang minim sekali pengetahuan dari bahaya bencana banjir. Masyarakat di sana juga sering membuang sampah sembarangan dan menebang pohon tanpa mengikuti sistem tebang pilih untuk kebutuhan pribadi.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini terdapat data bencana banjir yang ada di Kabupaten Karimun tentang potensi penduduk yang terparap bencana banjir yang ada di Kabupaten Karimun tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Bencana Banjir Kabupaten Karimun Tahun 2023

Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
	Penduduk	Kelompok Rentan			
		Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1. Belat	73	3	55	-	Sedang
2. Buru	913	24	913	3	Sedang
3. Karimun	7.706	88	1.239	7	Sedang
4. Kundur	6.486	543	2.084	10	Sedang
5. Kundur Barat	2.837	81	1.532	5	Sedang
6. Kundur Utara	1.897	210	1.020	7	Sedang
7. Meral	6.878	521	1.649	3	Sedang
8. Meral Barat	1.487	149	397	1	Sedang
9. Moro	936	24	396	-	Sedang
10. Sugie Besar	914	117	640	1	Sedang
11. Tebing	598	9	180	2	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karimun, 2024-2028

Berdasarkan data di atas, terdapat potensi penduduk terparap bahaya banjir di Kabupaten Karimun di tahun 2023. Kecamatan Karimun memiliki potensi penduduk terparap bahaya banjir tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya dengan data sebanyak 7.706 di tahun 2023. Sehingga dalam penelitian ini menetapkan tahun 2023 sebagai tahun penelitian karena di tahun tersebut kecamatan karimun (kelurahan Teluk Air, Lubuk, Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat) termasuk ke potensi penduduk terparap bahaya banjir terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Karimun.

Masalah banjir sudah seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi seluruh pihak, baik pihak masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Karimun harus lebih berhati-hati serta menjaga

lingkungan sekitar. Salah satu bencana yang mengakibatkan kerugian dan senantiasa mengancam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia adalah bencana banjir. Dapat di lihat dari tabel di bawah ini terdapat data 5 kelurahan di Kabupaten Karimun jumlah rumah yang terkena dampak bencana sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Kelurahan Terdampak Oleh Bencana Banjir Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah Rumah
1.	Lubuk Semut	10 (Sepuluh)
2.	Tanjung Balai	15 (Lima Belas)
3.	Teluk Air	171 (Seratus Tujuh Satu)
4.	Sungai Lakam Timur	217 (Dua Ratus Tujuh Belas)
5.	Sungai Lakam Barat	246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam)

Sumber : Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Karimun

Berdasarkan data tersebut kelurahan Sungai Lakam Barat merupakan kelurahan yang memiliki tingkat bencana banjir yang cukup tinggi. Berdasarkan data di atas kurang lebih 246 rumah di daerah Sungai Lakam Barat mengalami kerusakan dan terendam oleh bencana banjir. Sehingga lembaga atau instansi BPBD bisa menyelesaikan permasalahan bencana ini dengan cepat dan tepat sehingga tidak ada penambahan kasus bencana banjir yang ada di setiap kelurahan. Akan tetapi dalam perjalanannya BPBD masih minimnya program kerja, dan kesiapan atau kesiapan dalam menanggapi bencana banjir yang ada di wilayah-wilayah pelosok di Kabupaten Karimun. Sehingga dapat dilihat sejauh ini di lapangan masih belum maksimal upaya dari BPBD untuk mengantisipasi permasalahan bencana banjir tersebut.

Sementara itu apabila bencana banjir di abaikan nantinya akan sangat berdampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat yang terpapar oleh bencana banjir tersebut. Hal ini membuat

masyarakat yang terdampak banjir pasti merasakan kekecewaan terhadap pemerintah daerah, dikarenakan dari tahun ke tahun bencana banjir yang ada di Kabupaten Karimun ini belum memiliki solusi meskipun masyarakat sudah berulang kali mengeluhkan tentang bencana banjir ini. Di akhir- akhir tahun biasanya memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan selalu terjadinya bencana alam (banjir). Adapun fokus utama pada penelitian ini yaitu di beberapa kelurahan yang berada di Kabupaten Karimun tepatnya di kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini jika dilihat berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi BPBD dalam penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karimun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui Strategi BPBD Kabupaten Karimun dalam penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang BPBD Kabupaten Karimun dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Studi Kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat), ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara praktis dan teoritis adapun manfaat penelitian ini secara praktis dan teoritis antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana dan informasi mengenai BPBD Kabupaten Karimun dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Studi Kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat).

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang terjadi di kelurahan Teluk Air, Lubuk Semut, Tanjung Balai, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik nyata dengan tujuan untuk menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis. Serta hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi ataupun landasan teori bagi kalangan akademis mengenai strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karimun.

